

ABSTRAK

Rozzyana Nyndhya, 2210622006, Pidana Tambahan Restitusi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Oleh Kejaksaan, Dr. Supardi, SH., MH, Dr. Handoyo Prasetyo. SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pidana tambahan restitusi yang dilakukan oleh Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, serta menganalisis pengaturan yang ideal terhadap tuntutan pidana pengganti berupa restitusi, sehingga terwujud tuntutan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sehingga data dari penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian hukum (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini akan dipaparkan dengan menguraikan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisa dengan metode kuantitatif. Metode studi kepustakaan dimanfaatkan untuk mendapatkan keterangan atau informasi mengenai bagaimana pengaturan restitusi dan pidana pengganti restitusi baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan internal pada Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan restitusi seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan lembaga yang menyelenggarakan penuntutan yaitu Kejaksaan.

Pelaksanaan tuntutan pidana tambahan berupa restitusi dalam peraktek peradilan pidana di Indonesia telah berjalan dan dilaksanakan oleh para Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Namun dalam implementasinya, pelaksanaan restitusi dirasa belum optimal karena adanya kekosongan hukum baik dalam ketentuan pidana yang mengatur restitusi dalam undang-undang maupun dalam peraturan internal Kementerian/Lembaga dalam hal ini peneliti menyorot dari sisi Kejaksaan selaku Lembaga penuntutan.

Dalam contoh kasus yang diambil oleh peneliti baik dalam perkara Mario Dandy maupun dalam perkara Syahril Parlindungan ditemukan penerapan pidana pengganti yang berbeda apabila terdakwa tidak membayar restitusi. Hal tersebut dikarenakan tidak diaturnya pidana pengganti dari restitusi dalam pedoman tuntutan tindak pidana umum, sehingga penuntut umum dalam menyusun surat tuntutan tidak memiliki tolok ukur dalam mempertimbangkan atau menentukan pidana pengganti yang tepat apabila terdakwa tidak membayar restitusi.

Kata Kunci: *Restitusi, pidana pengganti restitusi.*

ABSTRACT

Rozzyana Nyndhya, 2210622006, Additional Criminal Restitution in the Handling of General Crime Cases by the Prosecutor's Office, Dr. Supardi, SH., MH, Dr. Handoyo Prasetyo. SH., MH.

The implementation of additional criminal charges in the form of restitution in criminal justice training in Indonesia has been carried out and implemented by Ministries/Institutions by their respective authorities. However, in its implementation, the implementation of restitution is considered not optimal because of the legal vacuum both in the criminal provisions governing restitution in the law and in the internal regulations of the Ministry / Institution, in this case, the researcher highlighted from the side of the Prosecutor's Office as the prosecution institution.

In the example of the case taken by the researcher both in the Mario Dandy case and in the Syahril Parlindungan case, it was found that the application of a different substitute crime if the defendant did not pay restitution. This is because there is no regulation for criminal substitutes from restitution in the guidelines for prosecuting general crimes, so that the public prosecutor in preparing the prosecution has no benchmark in considering or determining the appropriate substitute crime if the defendant does not pay restitution. This research is a normative juridical research so the data from this study is obtained from primary legal materials and secondary legal materials.

The legal research approach applied in this study uses a legal research approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study will be presented by describing the data obtained through literature studies analyzed by quantitative methods. The literature study method is used to obtain information or information about how restitution and criminal arrangements instead of restitution are regulated both in laws and regulations internally at the Ministries/Institutions that organize restitution such as the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and the institution that organizes prosecutions, namely the Prosecutor's Office.

Keywords: *Restitution, criminal substitute restitution*